

*Hoirun Nahdiyah*

**MENGGUGAH KEBERADAAN  
PESANTREN UNTUK MEMBANGUN  
NALAR PENDIDIKAN  
BERBASIS *LOCAL WISDOM***

**Suatu Tela'ah Eksploratif dalam Perspektif Budaya**

INSTIKA Sumenep

Email: [ira.nahdiyah@gmail.com](mailto:ira.nahdiyah@gmail.com)

**Abstrak:** *Pesantren merupakan suatu lembaga yang memiliki prinsip dan karakter yang khas untuk terlibat atau melibatkan diri dalam membangun masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan pesantren telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Sistem tradisionalistik pesantren yang selama ini kuat dipegang, ternyata mampu membuat masyarakat tertarik untuk membantu kinerja pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memegang kuat nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pesantren, Pendidikan, dan Masyarakat.*

## **Pendahuluan**

### **Pesantren: Deskripsi Akulturasi Budaya**

Pesantren, sebagai lembaga *indigenious*<sup>1</sup> Indonesia, mempunyai ragam prinsip dan misi prospektif dalam menatap perannya bagi masyarakat secara luas. Pesantren membuka ruang penuh kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan dan mengelola potensi-potensi mereka. Karena, nilai-nilai pesantren sangat *concern* dengan keberadaan masyarakat sekitarnya yang *nota bene* bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dan pemukiman terpencil.<sup>2</sup> Sehingga, jika pesantren mengakomodir sistem tradisionalistiknya yang selama ini dipegang, dapat mengukuhkan kepercayaan masyarakat untuk setidaknya-tidaknya berperan aktif membantu kinerja lembaga tersebut.

Kepercayaan yang begitu kuat tersebut, pada prinsipnya adalah hasil dekloralisasi ilmu pengetahuan (agama) yang memang menjadi *sign* tak tertulis dalam kelompok/warga pesantren itu sendiri. Dimana, ilmu pengetahuan (agama) selalu mendapat respon dan minat pembelajaran tidak saja bagi kiai atau santri yang telah lama dituntut untuk mendalami, tapi juga masyarakat luas yang ingin memperoleh ilmu pengetahuan meski ditengah-tengah kesibukannya yang padat.

Sehingga, tak berlebihan jika hari ke hari perkembangan pesantren mendapat posisi tawar menawar yang signifikan di sebagian besar masyarakat Indonesia. Terhapusnya eksklusivisme dalam konteks sistem pengajaran pesantren setidaknya merupakan langkah awal berkembangnya akar-akar sub-kultur kebudayaan lembaga tersebut. Hasrat masyarakat untuk melibatkan diri “sepenuhnya” pada pesantren tersaji sebagai struktur sosial (*social*

---

<sup>1</sup> Istilah ini merupakan idagium populer pesantren, karena menyebut lembaga ini sebagai institusi pendidikan yang memegang kokoh nilai-nilai keaslian (baik budaya dan struktur sosial) masyarakat Indonesia, selain juga ditilik dari latar belakang historis berdirinya pesantren yang mulai sejak pada kekuasaan Hindhu-Budha di Indonesia.

<sup>2</sup> Dalam beberapa pengamatan, pada dasawarsa delapan puluh, sekitar 65 persen berada di tengah-tengah areal pedesaan. Sementara, di masyarakat urban hanya berkisar 35 persen. Lih. Zamakhsyari Dhafir, *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI, 1995), hlm. 124. sehingga, tak salah kemudian, jika pesantren berusaha untuk tetap konsis dengan pelbagai perubahan (keadaan) sosial sekitarnya. Dapat dilihat pula dalam tulisan apik Dr. Abd. ‘Ala, Mengangkat Peran Pesantren dalam Pengembangan Civil Society, dalam *FAJAR*, (LPM STIK Annuqayah), edisi XI vol. VI Maret 2004, hlm. 26

*structure*) dalam suatu identitas budaya.<sup>3</sup> Dimana, dengan keunikan paradigma dan stigma normatif-struktural yang ada di pesantren tersebut, serta merta akan diikuti oleh masyarakat sebagai bagian interaksi kultural yang mengikat.

Melalui keterbukaan (inklusifitas) dan sistem tradisionalistiknya, masyarakat secara sengaja atau tidak, akan tersimpul dalam sebagian *the way of culture* pesantren. Singkronisasi ini telah semakin mengokohkan identitas pesantren—sebagaimana ungkapan Gus Dur—sebagai sub-kultur<sup>4</sup> masyarakat. Ada bangunan singkretis antara warga pesantren dan peranan masyarakat dalam konteks pemberdayaan keilmuan yang lebih dinamis dan progresif yang kemudian melahirkan sisi-sisi akulturasi budaya yang positif juga khas.

Salah satu wujud kecenderungan dari proses akulturasi ini dapat dilihat dalam mengakarnya pelbagai macam praktek “kebiasaan” (*habitat/costum*) para santri yang telah (lama) tinggal di pesantren tersebut. Dalam sisi analitis-sosio-kultural, kondisi pesantren terungkap dari pelbagai aspek kehidupan (baik lingkungan, santri, kurikulum, kepemimpinan, alumni bahkan sikap pesantren yang cenderung “apatis” terhadap perubahan—sehingga disebutlah lembaga ini sebagai lembaga yang *lagging behind the time*).<sup>5</sup>

Mengapa manifestasi kultural yang beragam dapat tumbuh ditengah-tengah lembaga tradisional ini? Sebagaimana disebut

---

<sup>3</sup> Lih. David Kaplan, *The Theory of Culture*, (Landung Simatupang, penerjemah), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 139. Bandingkan teori ini secara definitif oleh A.R. Radcliffe-Brown, *Method in Antropology: Selected Essays*, (M.N. Srinivas, Editor), (Chicago: University of Chicago Press, 1958), hlm, 177. Menurutnya Struktur Sosial adalah pengaturan kontinyu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau perilaku yang dimapankan secara sosial.

<sup>4</sup> Setidaknya, ungkapan Gus Dur itu dapat dikorelasikan dengan pandangan Dr. Alo Liliweri, M.S. yang mengatakan bahwa sub-kultur merupakan suatu kelompok atau sub unit budaya yang berkembang ketika adanya kebutuhan sekelompok orang untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan pengalaman bersama. Selengkapnya, lih. Dr. Alo Liliweri, M.S., *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 112

<sup>5</sup> Aspek-aspek tersebut merupakan hasil generalisasi kondisi pesantren yang masih begitu sulit menerima perubahan. Ini dapat dilihat dari deskripsi keberadaan pesantren yang masih belum memenuhi standar institusi yang cukup memumpuni untuk meyeimbangkan dengan pelbagai potensi manusia modern. Lebih lanjut tentang pengilustrasian ini, dapat dilihat di Noer Cholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 90-100. Namun, yang perlu dicatat disini adalah perkembangan pesantren biasanya selalu dituntut oleh penetapan arah visi dan misi dimana pesantren tersebut berdiri.

diatas, pesantren mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan timbulnya percampuran budaya dengan diikat dalam satu sistem administratif yang—biasanya—sangat sederhana. Masyarakat kemudian begitu mudah (baca; senang) memasukkan sanak keluarganya ke pesantren sebagai wujud perhatian mereka terhadap peran dan fungsi lembaga ini yang begitu relevan. Hingga, kesempatan ini pada gilirannya membuka interaksi multi-kausal antara perilaku (kebiasaan) yang dibawa oleh santri dari rumahnya yang masing-masing berbeda kebudayaan serta tradisi. Apalagi, di level masyarakat yang mayoritas berpenduduk “*old style*” menegaskan betapa pesantren dihiasi dengan pelbagai gaya, prosedur-prosedur kehidupan sehari-hari yang relatif tradisonalistik. Meski, sejauh anggapan penulis, nilai-nilai konservatifitas dan kekolot-an belum menjadi “standar formal” bagi lembaga ini.

Dalam realitas kehidupan, akulturasi budaya pesantren serta merta memberikan simbol kuat yang senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan. Pesantren, dalam perjalanannya, masih tetap eksis dalam struktur kelembagaan dengan dasar (atas nama) budaya dan kecenderungan dinamika kehidupan lain. Ini dipahami untuk menentukan sejauhmana kiprah pesantren sebagai lembaga yang lekat dengan tradisi masyarakat dapat memberdayakan penuh potensi-potensi mereka yang selama ini “terpinggirkan” dibawah berdirinya kebijakan birokratis yang *an-sich*.

Tentu saja, dalam aksentuasi berjalannya sejarah kemudian, tujuan pesantren yang salah satunya didukung dengan melekatnya gambaran (realis) akulturasi budaya itu mengalami pasang surut baik dalam proses penuntasan pelbagai macam pergolakan masyarakat yang menjadi jalinan sosial yang utuh di tubuh pesantren itu sendiri.

Dibutuhkannya langkah preventif pengembangan atau semacam eskalasi kebudayaan pesantren dalam menentukan arah Indonesia ke depan yang saat ini masih “terseret-seret” dalam hiruk pikuk dunia global yang menganjurkan sistem kebudayaan fisik yang modernis berwatak “westernistik”, menjadi keniscayaan tersendiri dalam mengangkat peran idealisme pesantren itu sendiri.

## **Pembahasan**

### **Pesantren dan Wajah Masyarakat Indonesia: Membangun Sistem Budaya**

*“Paro kedua abad ke dua puluh, ditandai oleh pergeseran-pergeseran politik, sosial dan kultural ke arah heterogenitas lokal, regional dan isolasionalisme pada tahun 1970-an gerakan-gerakan kelompok minoritas merebak di Eropa dan Amerika Utara, seperti gerakan anti rasisme, sub-kultur, gay dan feminisme.*

*Perkembangan ini pada umumnya dipandang sebagai satu kecenderungan global ke arah pembentukan identitas dan pluralisme kebudayaan. Di Indonesia, pengaruh gerakan tersebut baru terasa pada dekade 80-an, baik pada diskursus pemikiran maupun pada tingkat perkembangan nyata kehidupan sosial, khususnya di kalangan kaum muda perkotaan”<sup>6</sup>.*

Namun, benarkah masyarakat Indonesia mengalami stagnasi kultural sebagaimana deskripsi sosiologis Yasraf Amir Piliang tersebut sebagai akibat reaksi fatal dari proses modernisasi? Mungkinkah identitas pesantren dalam bentuk tradisi, kebudayaan, etnik, identitas lokal, sub-kultur akan terkubur oleh diskursus kebudayaan modern tersebut yang pada hakikatnya menghasilkan “monumen-monumen seni dan kebudayaan yang bersifat progresif dan utopis”<sup>7</sup>? Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pesantren merupakan bangunan dari pelbagai aktifitas budaya (para santri) yang diikat oleh satu sistem. Sehingga, lembaga ini masih tetap lekat sebagai lembaga tradisional dalam konteks kehidupan sehari-harinya, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Meski, pesantren merekonstruksi sistem pembelajaran ke arah pengembangan yang lebih inovatif. Inilah “sisi” lain perjalanan kiprah pesantren di Indonesia.

Terlepas dari itu, sejak akhir abad ke 1997, masyarakat Indonesia pelan-pelan memasuki tatanan dunia baru. Adalah Alexis Carrel dalam bukunya *The Man Unknown* lebih menyebut keberadaan kala itu sebagai bentuk abstrak nilai-nilai budaya; fungsi-fungsi organis manusia diganti dengan mesin, mengubur kode etik dan moralitas, hingga pandangan akan tradisi dan paradigma-paradigma “budaya kuno” dihapuskan sebagai persiapan memasuki

---

<sup>6</sup> Lih. Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*, (Bandung: Mizan, cet II. 1998), hlm. 213

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 153-154

era modern.<sup>8</sup> Pelbagai penyakit-penyakit kronis menjangkiti hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik dari sisi fisik, psikis, dan spiritual. *Split personality*,<sup>9</sup> *spiritual crisis*,<sup>10</sup> krisis kepercayaan bahkan krisis identitas merupakan rentetan statement pelbagai penyakit untuk menyebut kondisi yang dialami Indonesia saat itu.

Sayangnya, gaya-gaya tersebut menimbulkan implikasi tersendiri, yang secara implisit, menyusup pada nilai-nilai khas pesantren. Sementara, pesantren dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut, tanpa harus merusak seluruh tatanan yang didasarkan pada determinisme sejarah berdirinya secara kelembagaan. Maka, Bergeraknya sistem globalisasi justru menganjurkan adanya tatanan yang lebih baru; proses desakralisasi ilmu pengetahuan, dan manifesto percepatan-percepatan secara mekanis dan teknologis.<sup>11</sup>

Yang ironis ialah bahwa berdirinya akulturasi budaya di pesantren yang diharapkan menjadi standar *genuine* kokohnya identitas budayanya dalam menghadapi maraknya akar-akar globalisasi, malah menggiring masyarakat dalam masifikasi sosial dan cenderung melihat pesantren sebagai lembaga yang kolot,

---

<sup>8</sup> Pernyataan Carrel dapat dibandingkan dengan kegelisah Dr. Mansour Fakih dalam *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 54

<sup>9</sup> *Split Personality* atau kepribadian yang terpecah merupakan suatu penampakan emosi seseorang dalam memaknai kehidupan yang identik dengan *chaos*, sadistik meski ditengah-tengah lingkungan yang selama ini dianggap hangat, harmonis dan rukun (seperti, rumah, tetangga dan bahkan famili terdekat). Penyakit ini mungkin lebih tepat merupakan istilah dari orang-orang yang terlanjur masuk dalam predisposisi baik dalam konteks budaya, sosial dan politik. Lih. Hamdi Muluk, "Split Personality atau Schizophrenia Sosial" dalam *Kompas*, 12 Mei 2001

<sup>10</sup> *Spiritual crisis* merupakan konsekuensi dari hancurnya nilai-nilai pemaknaan terhadap kuasa takdir (*predistination*) dan pengenalan diri kepada yang Absolut, Tuhan. Krisis ini pada akhirnya akan melahirkan pelbagai polemik sosial berupa krisis ekonomi, bahan bakar, makanan, lingkungan ataupun krisis kesehatan. Hal ini pernah dilontarkan oleh Chumacher dalam bukunya *A Guide for The Perplexed* (1981) yang dikutip oleh Sukidi, "Setelah Krisis Spiritual lalu Berkiblat Ke Hati Nurani" dalam *Kompas*, 16 Februari 2001. Selain itu, krisis tersebut pernah dikatakan oleh ahli psikologi ternama Carl Gustav sebagai *existencial illness*, Dr. Michael Kearney menamakannya sebagai *soul pain*, atau *spiritual emergency* yang dinyatakan oleh psikolog Christina dan Stanislav Grof.

<sup>11</sup> Desakralisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya berkembang bersamaan dengan munculnya sikap-sikap sekuler orang-orang Barat. Bahkan paham sekularisme menganjurkan adanya pembangunan riset artifistik fisikawan Stefan Hawking dan sebagainya yang pada akhirnya menyimbolkan adanya interpretasi-interpretasi radikal yang tidak ditopang dengan kesadaran religiusitas.

eksklusif, konservatif dan serba pragmatis.<sup>12</sup> Tentunya, penulis tidak langsung gegabah meng-klaim lembaga tersebut “sepenuhnya” tidak menghargai keberadaan sosial sekitar, atau berkesimpulan ada korelasi yang cukup signifikan antara tegaknya tradisi(onalisme) pesantren dengan komunitas manusia modern saat itu. Akan tetapi, yang ingin ditekankan disini adalah pesantren yang mempunyai *folk culture* (kebudayaan tradisional)<sup>13</sup> harus berbenturan dengan sistem multikulturalisme<sup>14</sup> yang digembor-gemborkan oleh globalisasi. Seiring dengan hal ini, pesantren cenderung begitu kurang memperhatikan terhadap perkembangan masyarakat dalam konteks pemberdayaan potensi-potensi mereka dan secara sistemik menuntut keterlibatan santri untuk berperan aktif sebagai *agent of social control* atau *agent of change* (*mujaddid*, pembaru-transformator) secara utuh.

Maka, tak heran jika ada beberapa *stereotype* yang menyebut bahwa pesantren mengalami “pengikisan idenitas” (*identity erosion*). Bahkan, ada sebagian warga pesantren (alumnus) yang berangsur-angsur beralih pandangan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri/umum (konvensional) karena dianggap lebih mendukung masa depan yang lebih akademistis. Jika hanya dimaksudkan untuk menambah kualitas wawasan, biasanya terlihat betapa terdapat kontradiksi antara masyarakat yang menginginkan itu, dengan pola pikir mereka yang masih belum maksimal mengontrol anak-anaknya dalam memilih level pendidikan yang cocok. Ini merupakan beban yang cukup subtil dan mesti disikapi secara serius oleh pesantren, sebagai konsekuensi logis yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia dewasa saat ini.

Noer Cholish Madjid (alm), dalam beberapa tulisan penelitiannya, menyebutkan bahwa invasi peradaban Barat yang berlatar modern dan global pada hakikatnya adalah upaya

---

<sup>12</sup> Lih. Dr. dr. Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15-16.

<sup>13</sup> Folk Culture (Kebudayaan Tradisional), istilah ini merupakan “wujud perilaku yang merupakan kebiasaan atau cara berpikir dari suatu kelompok sosial yang ditampilkan melalui—tidak saja—adat istiadat tertentu, tetapi juga perilaku adat istiadat yang diharapkan oleh anggota masyarakatnya. Selengkapnya, lih. Dr. Alo Liliweri, M.S., *Op. Cit.*, hlm. 113

<sup>14</sup> Suatu paham yang kini sangat dominan dibicarakan yang menggambarkan suatu pengakuan dan representasi kultural dari pelbagai etnik dan ras. Meski, paham ini digunakan untuk mengapresiasi seluruh tatanan budaya yang berbeda-beda, namun seringkali mengakibatkan ketegangan dan konflik antar etnik.

penggiringan masyarakat terhadap konotasi (konsep) “westernisasi” di Indonesia.<sup>15</sup> Lebih jauh, beliau melihat beberapa tantangan yang dihadapi dalam konteks pemaduan nilai-nilai modernisasi itu sendiri. Sementara, ilustrasi masyarakat pesantren yang begitu sulit menjawab tantangan global sangat nampak ketika dihadapkan pada realitas budaya modern. Mungkin, semangat non-materialistik (atau lebih mudahnya; kesederhanaan) yang selama ini berada dalam posisi internal pesantren akan sekilas ber”*mask*” dengan pelbagai wajah kontradiktif lainnya; hedonisme, pragmatisme—sebagai bagian dari lahirnya globalisasi.

Masyarakat Indonesia kemudian berpandangan, berubahnya kebudayaan pesantren tersebut dapat menjadi alasan mengapa ada beberapa klasifikasi model-model lembaga keagamaan tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh Dr. dr. Wahjoetomo yang membedakan antara model pesantren *salaf* dan pesantren *kehalaf*.<sup>16</sup>

Dalam perspektif budaya, kedua pesantren ini mempunyai arah berbeda dalam tradisi dan kebiasaannya baik menyangkut soal sistem, kurikulum hingga keberadaan santrinya. Pesantren *salaf* yang lebih dikenal sebagai pesantren kuno, aktifitas kesederhanaan begitu nampak dipermukaan dan dianggap masih belum memberikan nilai maksimal yang utuh terhadap problematika manusia modern. Sementara, di sisi lain masyarakat lebih menganggap pesantren *kehalaf* sebagai pesantren modern yang telah kehilangan standar identitas ketradisionalannya. Meski, ada upaya penyeimbangan antara nilai-nilai klasikal dan modern, justru pesantren tersebut masih belum mempunyai tenaga dan fasilitas memadai untuk mengembangkan kedua-duanya sekaligus dalam konteks peradaban global.

Tak salah, jika ada beberapa kekhawatiran yang muncul akhir-akhir ini terhadap pesantren baik dari segi ke-transisi-an lembaga ini dalam koridor kebudayaan atau muncul manifestasi kebudayaan para

---

<sup>15</sup> Proses penyamaan istilah westernisasi sebagai analogi dari istilah modern atau globalisasi pada hakikatnya lebih mengarah pada tataran historis. Karena, pada dasarnya nilai-nilai yang dianggap modern itu memang didominasi nilai-nilai dari Barat. Lih. Noer Cholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 89

<sup>16</sup> Sebenarnya, perbedaan yang peling nampak dari pesantren *salaf* dan *khalaf* lebih terletak pada penekanan materi pengajaran yang disampaikan. Pesantren *salaf* memilih kitab-kitab klasik sebagai inti pengajarannya, sedangkan model pengajaran pesantren *khalaf* lebih mengarah pada pembelajaran umum, seperti dengan terbangunnya sekolah-sekolah umum di pesantren. Selengkapanya lih. Dr. dr. Wahjoetomo, *Op. Cit.*, hlm. 82-89



warga pesantren (santri) itu sendiri pada masyarakat secara luas. Jika hal ini memang benar-benar terjadi, dimanakah masyarakat Indonesia berpijak dalam ruang-ruang globalitas ini, sementara pesantren sebagai satu-satunya lembaga keagamaan yang paling berkiprah memberikan semangat kemajuan (progresifitas) baik dalam hal kreatifitas, intelektual dan moral masih belum menunjukkan andilnya?

Pesoalan ini adalah poin kedua yang ingin dipaparkan dalam tulisan ini. Menurut dugaan sementara penulis, ada dua hal konsekuensi yang akan diterima oleh pesantren itu sendiri atau masyarakat Indonesia secara umum.

*Pertama*, penulis menduga kuat bahwa posisi pesantren akan kehilangan keseimbangan dalam hal mempertahankan kebudayaan tradisionalistik. Sehingga, masyarakat Indonesia pada gilirannya tidak dapat membedakan lebih jelas ciri antara pesantren dengan pendidikan umum (konvensional) lainnya. Di kalangan masyarakat lokal atau pedesaan sendiri—yang mayoritas bertempat tinggal di lingkungan (sekitar)nya—pesantren kemudian diposisikan secara relatif “lebih eksklusif (atau lebih tepatnya berpandangan skeptis)” terhadap perkembangan masyarakat sekitar.

*Kedua*, masyarakat (lokal) Indonesia akan lebih menganggap pesantren hanya sebatas non-fomalisme pendidikan nasional. Dalam sistem pengajaran yang hampir lebih sama dengan sistem pengajaran nasional tersebut, hanya yang membedakan dalam sisi kesehariannya yang berlatar heterogen.

Berlangsungnya epistemologi keberadaan keilmuan pesantren tersebut pada akhirnya akan mengubah masyarakat Indonesia yang semula berkeadaban, masuk pada level massif yang membekukan seluruh kerangka kreatifitas dan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku. Masyarakat Indonesia kemudian lebih berkeinginan untuk membuat suatu sistem dan budaya sendiri daripada mengimitasi budaya pesantren yang telah dipandang berada dalam keadaan terhimpit. Hal inilah yang kemudian disebut Dr. Alo Liliweri, M.S. sebagai *power distance* (PD), suatu konsep kebudayaan yang merefleksikan tatanan masyarakat yang ditata berdasarkan “jarak kekuasaan” karena mempertanyakan figur atau struktur organisasi yang menggunakan kekuasaan hanya untuk tujuan legitimasi atau bahkan

menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu (pribadi/kelompok).<sup>17</sup>

Ambiguitas pesantren yang telah terlihat oleh masyarakat sebagai *power distance* akan banyak berakibat pada resiko terbangunnya kebudayaan baru masyarakat lokal. Ini merupakan ancaman kebudayaan eksternal yang dihadapi pesantren dalam mempertahankan sistem kelembagaannya yang nota bene memegang teguh akulturasi kebudayaan berbasis nilai-nilai tradisional.

Tentunya, masyarakat berangsur-angsur akan memperkenalkan diri dengan berpindahnya keinginan mereka untuk bersosial dengan pendidikan Indonesia secara umum. Ini akan membangun suatu komunitas yang tidak dapat teridentifikasi; apakah stagnan atau lebih dinamis. Dalam hal demikian, pengelola pesantren terhadap perkembangan masyarakat lokal terkesan menjaga jarak dan setengah hati. Di satu sisi, pesantren dituntut untuk menjawab tantangan kebudayaan globalitas secara relevan, sementara disisi lain, krisis kepercayaan (sosial) sudah mulai merasuki pola pikir masyarakat terhadap pesantren itu sendiri. Inilah suatu tatanan kebudayaan pesantren diatas parodi-parodi kehidupan sosial masyarakat modern Indonesia.

### Menuju Pendidikan Berbasis *Local Wisdom*

*“Sekolah, sama seperti lembaga-lembaga perantara lain bagi peran serta sosial manusia dewasa, pada dasarnya selalu bersifat mengekang. Sekolah yang menyangkal atau menolak peran sebagai pengekang, sekolah yang mengklaim keselarasan dengan masyarakat tanpa harus berperan mengekang, adalah sekolah yang munafik dan menyesatkan*

---

<sup>17</sup> Konsep *Power Distance* ini, pada hakikatnya juga mengakibatkan pelbagai konsep-konsep kebudayaan yang cenderung apatis dengan keberadaan kondisi sosial suatu masyarakat. Hal ini didukung oleh perkembangan praktek-praktek organisasi tertentu yang memperlihatkan jarak kekuasaan tadi. Beberapa akibat yang ditimbulkannya antara lain *Uncertainty Avoidance* (keterancaman budaya yang tidak pasti), *Individualism-Collectivism* (budaya atas nama individu atau kolektif) dan *Masculinity-Feminity* (derajat gender dalam suatu konsep kebudayaan), lih. Dr. Alo Liliweri, M.S., *Op. Cit.*, hlm. 162-168

*lebih buruk lagi, ia sangat berbahaya. Ia menyangkal peran sebagai agen historis”.*<sup>18</sup>

Demikian, kutipan kegelisahan Samuel Bowles dan Herbert Gintis, para ekonom dari Universitas Massachusetts di Amherst, sebagai “curhat” teoritis dalam melihat fenomena sistem pendidikan di seluruh dunia, yang pada hakikatnya kenyataan ironi tersebut terwujud lewat konfrontasi antar potensi genetik dengan pengalaman sosial ketika itu.

Kurang lebih, begitulah gambaran singkat keberadaan pendidikan (pesantren) kita yang masih berkedudukan sebagai aktan perantara (*l’actant mediatrice*)<sup>19</sup> dalam membangun komunitas berkeadaban dan paham tentang kreatifitas bersosial di lingkungan sekitar. Keterbatasan kemampuan berasosiasi dan lemahnya kurikulum berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia tidak saja menyulitkan sekolah-sekolah umum/negeri untuk mengaktualisasikan secara lebih komprehensif pada siswa, tapi juga pesantren—yang pada tataran ini—sedang berusaha memasukkan sistem tersebut dalam sistem tradisionalistiknya yang semula. Namun, dalam perjalanannya, pesantren masih belum mampu mewujudkan eskalasi pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Setidaknya, ada dua hal pokok yang berkaitan dengan keterhambatan pesantren ini untuk membuka ruang sistem pendidikan yang lebih baru; tidak adanya konsep yang relevan untuk mengakselerasi perubahan tersebut dan kurang memadainya pelbagai pokok-pokok pengajaran akademik untuk memenuhi standar kurikulum nasional yang diharapkan dapat menjadi stimulator pengembangan peran pesantren pada masyarakat yang lebih baik.

Beberapa kasus yang terjadi perihal maraknya isu akreditasi pendidikan pesantren dalam standar kurikulum hampir seluruhnya dibicarakan. Sepertihalnya tentang ukuran standar nasional akreditasi tersebut dan keterlibatan warga pesantren dalam

---

<sup>18</sup> Lih. Samuel Bowles dan Herbert Gintis, “Pendidikan Revolusioner” dalam *Menggugat Pendidikan, Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis*, (Omi Intan Naomi, Alih Bahasa), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. IV 2003), hlm. 430

<sup>19</sup> Sebenarnya jargon tersebut lazim digunakan untuk ungkapan sebuah rangkaian siklus kronologis turunnya wahyu dalam analisis semiotik yang dipakai Mohammed Arkoun, pemikir muslim kontemporer. Namun, penulis mengungkannya sebagai dasar perbandingan metodologis.

perumusannya.<sup>20</sup> Ini merupakan konsekuensi standar pendidikan pada pesantren yang pada akhirnya masih belum mencapai titik maksimal.

Meski, sekali lagi, seluruh upaya tersebut merupakan sumbangsih pemikiran para pemerhati pendidikan (pesantren), para siswa (santri) justru masih tertekan dengan polemik kebudayaan modern yang lebih global. Tidak ada semangat pendidikan yang diusahakan oleh pesantren dalam upaya penuntasan problematika ini. Padahal, pendidikan, menurut Dr. Mansour Fakih dalam suatu pengantar buku “Kapitalisme Pendidikan”, merupakan suatu strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensi manusia.<sup>21</sup> Dan pesantren itu sendiri didirikan oleh semangat untuk mengadakan transformasi sosial bagi (masyarakat) daerah sekitarnya.<sup>22</sup>

Dalam konteks inilah, muncullah beberapa kasus yang nyaris sepenuhnya mendorong pesantren terjebak dalam kungkungan globalisasi. Salah satu wujud dari kasus-kasus ini dapat dilihat dari maraknya para santri yang lebih mengedepankan identitas kultur pesantren sebagai manusia yang senantiasa ber”sarung” dan beraktifitas dalam tataran spiritual di pelbagai pesantren-pesantren terutama pesantren modern, dalam beberapa tahun terakhir ini, dengan maksud untuk lebih menunjukkan citra kepribadian dan gengsi sosial kepada masyarakat. Meski, ada maksud untuk menjaga diri dalam pelbagai budaya-budaya luar (masyarakat), namun betapa ada kontradiksi ketika mereka begitu sulit menunjukkan kualitas keilmuannya pada masyarakat. Noer Cholish Madjid-pun dengan tajam memberikan contoh segi-segi kesulitan pesantren dalam konteks masyarakat lokal (*local community*) itu. Salah satunya ialah

---

<sup>20</sup> Selain kebimbangan akan perumusan akreditasi standar pendidikan pesantren, salah satunya yang dikhawatirkan ialah tidak adanya konsep standar yang komprehensif menjelaskan perbedaan standar antara pendidikan keagamaan di pesantren dan madrasah diniyah, dengan pendidikan keagamaan di MI, MTs ataupun MA. Lih. A. Waild, Mengakreditasi Pendidikan Pesantren dalam Majalah *Bina Pesantren*, (Jakarta Timur: Proyek Peningkatan Pondok Pesantren DEPAG RI bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M), edisi 4/2004. Sehingga, adanya konsep pendidikan yang lebih mengarah kepada pembentukan sistem pendidikan yang proporsional menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan

<sup>21</sup> Lih. Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetensi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II 2001), hlm. iii

<sup>22</sup> Lih. Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 152

kebanggaan pesantren sebagai lembaga yang mampu menciptakan kader-kader pemimpin masyarakat, ternyata para alumni (santri)nya hanya cocok, meski terutama untuk jenis masyarakat yang memang sudah dari semula menerima dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di pesantren bersangkutan. Sedangkan, masih menurut Cak Nur, dalam tataran masyarakat umum, mereka sama sekali belum memumpuni. Ini dapat dilihat dari sulitnya tenaga-tenaga yang memumpuni untuk mengajar agama-agama di sekolah-sekolah umum kendati jumlah lulusan dan santri pesantren sangat banyak.<sup>23</sup>

Situasi ini, pada prinsipnya, dimunculkan karena ada *gap of culture* (kesenjangan budaya) antara komunitas kaum bersarung (santri) dengan masyarakat lokal Indonesia. Maka tak heran, kesenjangan ini muncul bukan akibat dari takaran kebudayaan globalisasi yang masuk ke pesantren dan mengakibatkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, tapi lebih kepada sistem pendidikan yang masih belum menjamah sisi-sisi normatif kebudayaan pesantren itu sendiri.

Sehingga, diperlukan metode atau semacam sistem preventif pendidikan pesantren yang lebih *memonitoring* arah kebudayaan pesantren dengan masyarakat agar tercipta suasana “*local wisdom*” (kearifan lokal)<sup>24</sup> di tengah-tengah nuansa tradisional pesantren. Dalam pembahasan kali ini akan mengedepankan kerangka sistem pendidikan berbasis *local wisdom* yang dapat diaplikasikan oleh pesantren dalam konteks struktur kebudayaannya.

Ada beberapa teori yang penulis anggap dapat membangun sisi-sisi sketsa aplikatif pendidikan (pesantren) berbasis *local wisdom*. Namun, sebelum penulis mengeksplorasi konsep-konsep tersebut. Terlebih dahulu, penulis ingin menegaskan bahwa unsur-unsur teori dalam membentuk sistem pendidikan berbasis *local wisdom* lebih merupakan anjuran diskursus akademis yang tentunya dapat dipenuhi dengan pelbagai unsur-unsur lain yang mendukung.

---

<sup>23</sup> Lih. Noer Cholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 96

<sup>24</sup> Konsep *local wisdom* yang ditawarkan penulis disini adalah lebih dimaksudkan untuk mengajak santro menerapkan suatu tatanan kebudayaan yang memahami struktur masyarakat lokal lembaga pesantren. Terciptanya *local wisdom*, dalam contoh yang konkrit, tidak saja mengaktualisasikan seluruh materi-materi keagamaan yang diajarkan di pesantren, tetapi juga dapat memosisikan diri sebagai seseorang yang mampu menjadi pelayan masyarakat dalam segala persoalan sosial yang sedang dihadapi. Sehingga, akan tercipta masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya pembenahan dan pemberdayaan yang lebih baik.

Karena kerangka teori ini hanya gambaran umum (*general descriptio*) yang dapat dihimpun oleh penulis sebagai upaya pembangunan dimensi sistem pendidikan tersebut.

Maka, dalam kaitannya dengan upaya pembentukan sistem itu, komponen-komponen yang perlu diperhatikan kemudian dipraktekkan oleh pengelola pesantren harus lebih mencakup pada dua sub-sistem yang berlaku—sebagaimana tawaran teori Ivor Morrish—yaitu:

*“Most educational developments and improvements involve changes in both the knowledge and the activities of teacher, which in turn will be closely related to in which the individual teacher conceives his professional role and identity”<sup>25</sup>*

Pertama, konsep integral “*model for*” (model untuk) dan “*model of*” (model dari). Singkatnya, *model for* merupakan model yang berupa pola dari sistem pengetahuan, gagasan dan cita-cita dari suatu masyarakat tentang bagaimana seharusnya dan sebaik-baiknya. Sedangkan *model of* adalah model yang tumbuh dari pola kehidupan yang hidup dalam realitas masyarakat. pesantren yang mempunyai tugas dan misi untuk menjadikan santri menjadi manusia yang dinamis dan kreatif, serta merta menuntut partisipasi aktif dalam kancah sosial. Artinya, korelasi *model for* dan *model of* dapat diterapkan bersama-sama dalam sistem budaya masyarakat Indonesia, khususnya pesantren yang heterogen. Apalagi, kedua model ini merefleksikan sistem *top down* dan *bottom up* yang menjadi konsep paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita dewasa ini.<sup>26</sup>

Kedua, *Social Learning Theory*.<sup>27</sup> Suatu teori kurikulum yang digagas pertama kali oleh Albert Bandura, seorang psikolog universitas Stanford Amerika Serikat. Teori ini pada dasarnya menggunakan dua pendekatan yang ditekankan pada santri, yaitu (1) pendekatan melalui penyajian pembiasaan merespon (*conditioning*)

<sup>25</sup> Lih. Ivor Morris, *Aspects of Educational Change*, (London, 1976), hlm. 50

<sup>26</sup> Konsep ini pada awalnya digagas oleh Clifford Geerts, seorang peneliti perubahan sosial Indonesia khususnya pada masyarakat Jawa, untuk digunakan sebagai alat memahami kehidupan suatu masyarakat yang diteliti. Ulasan tentang konsep ini dapat dilihat di Prof. Dr. Sjafrir Sirin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 36-37

<sup>27</sup> Lih. Kutipannya di Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 95-96

dan (2) pendekatan melalui peniruan (*imitation*). Konsep *conditioning* tak jauh berbeda dengan prosedur belajar dalam berperilaku yaitu adanya *reward* (ganjaran) dan *punishment* (hukuman), artinya bagaimana santri dapat memahami kedua prosedur ini sebagai pertimbangan dalam berperilaku sosial. Sedangkan *imitation* merupakan konsep anjuran kepada guru yang dituntut menjadi figur santri dalam berperilaku sosial. Konsep pembelajaran semacam ini akan memberikan kontribusi keilmuan kepada siswa dalam memahami struktur kehidupan sosial masyarakat secara luas.

*Ketiga*, pengenalan kondisi masyarakat lokal. Pembangunan sistem pendidikan pesantren berbasis local wisdom pada hakikatnya mesti menuntut santri dan pengelola pesantren melakukan sosialisasi lanjutan yang lebih dinamis dalam memperkenalkan diri dengan masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memahami terlebih dahulu medan masyarakat yang akan diajak pada upaya penyamaan budaya pesantren. Pemahaman akan kondisi masyarakat lokal diharapkan menjadi bahan ukuran santri dan pengelola untuk mempertimbangkan sistem kurikulumnya dengan masyarakat tersebut. Hal ini tentunya menegaskan peran dan idealisme pesantren yang memang digerakkan untuk mentransformasi keberadaan masyarakat.

Mengenai tatacara konsep ini, hampir lebih sama dengan tawaran tiga prinsip dasar yang dikembangkan oleh pengikut aliran non-positivisme dalam pembacaan fenomena sosial yaitu (1) individu (santri) menyikapi apa saja yang ada di lingkungannya berdasarkan makna yang diperolehnya, (2) makna tersebut diperoleh melalui interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain, (3) makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya.<sup>28</sup> Sehingga, dengan inilah, santri pesantren dapat melakukan pola interaksi yang positif ditengah-tengah kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>28</sup> Ketiga prinsip itu mendeskripsikan bahwa setiap individu dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana ia melihat orang lain. Dalam posisi ini, ia tidak berjalan secara pasif, artinya individu memiliki kemampuan untuk membaca situasi yang melingkupi hidupnya. Sehingga, ia mampu mengambil interpretasi terhadap aktivitas sosial masyarakatnya. Lih. Dr. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II 2003), hlm. 199

*Keempat*, orientasi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Upaya pembenahan sistem pendidikan berbasis *local wisdom* pada tataran pembelajarannya, setidaknya mesti dilakukan sebagai internalisasi nilai-nilai (baik budaya, pengetahuan dan religiusitas) masyarakat lokal. Proses belajar mengajar seharusnya diringi dengan materi-materi dan penyuluhan tentang keberadaan sosial, tingkah laku dan kebiasaan masyarakat sekitar pesantren. Sehingga, para santri mempunyai peran dalam proses pemberdayaan masyarakat dan membangun kearifan dialog anatar sesama melalui bekal-bekal pengajaran yang lebih menyentuh pada nilai-nilai kemasyarakatan.

Namun, bisakah unsur-unsur ini diterapkan ditengah-tengah kegiatan dan aktifitas pesantren yang padat? Maka ada agenda yang mesti dilakukan oleh pesantren yaitu berupaya menerakan unsur-unsur tersebut dalam tataran kebudayaan, tradisi dan kebiasaan santri. *Memonitoring* segala unsur-unsur tersebut adalah salah satu upaya penanaman kebudayaan dalam konteks sistem pembelajaran pesantren. Maka, konsepsi kebudayaan menjadi keniscayaan dalam hal ini.

Unsur-unsur tersebut diusahakan dapat terlihat dalam perjalanan pendidikan pesantren secara sistemik. Hingga, pada akhirnya menjadi suatu budaya positif bagi santri dan dapat membangun komunitas berkeadaban pada masyarakat sekitarnya. Tentunya, sebagaimana telah dipaparkan dimuka, partisipasi pengelola pesantren, santri dan masyarakat (di sekitar) pesantren harus dimaksimalisasikan dalam pembentukan sistem pendidikan *local wisdom* tadi. Melalui pembiasaan (budaya), akan tercipta suatu tatanan (pendidikan) pesantren yang respektif terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal (sekitar) pesantren

### **Kesimpulan**

Beberapa hal yang dibutuhkan dalam tulisan ini menyangkut perkembangan budaya warga pesantren untuk mewujudkan sistem pendidikannya berbasis *local wisdom* lebih merupakan hipotesis-hipotesis awal yang tentunya sangat membutuhkan penelitian, teori, pengujian atau diskusi lebih lanjut.

Dari deskripsi diatas, kita dapat menyimpulkan betapa arus globalisasi akan menjebak pesantren dalam kungkungan paradigmatiknya. Sehingga, wajah pesantren terlihat begitu “menakutkan” di mata masyarakat sekitar. Kondisi yang



sedemikian itulah, hanya dapat diatasi dengan upaya eskalasi sistem pendidikan dalam konteks budaya. Pesantren, dalam hal ini, diharapkan dapat mengejawantahkan semangat toleransi dengan masyarakat sekitar agar tercipta suasana kearifan lokal (*local wisdom*). Upaya ini dilakukan dalam melalui pembiasaan sistem pendidikan pesantren berbasis local wisdom kepada para santri. Tentu, tak ada jalan lain, kecuali mulai membenahi sistem pendidikan pesantren melalui perspektif budaya dari hal-hal yang paling sederhana dari yang paling mungkin kita lakukan, ketimbang menyalahkan kepada kultur dominasi global dan komunitas pesantren yang tradisional. *Wallahu'alam bis Shawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ala, Abd. Maret (2004). Mengangkat Peran Pesantren dalam Pengembangan Civil Society, dalam *FAJAR*, (LPM STIK Annuqayah), edisi XI vol. VI.
- Kaplan, David. (1999). *The Theory of Culture*, (Landung Simatupang, penerjemah), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Liliweri, Alo. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholish Madjid. Noer. (1997) *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Amir Piliang, Yasraf. (1998) *Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*, Bandung: Mizan, cet II
- Fakih, Mansour. (2002). dalam *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muluk, Hamdi. 12 Mei (2001). “Split Personality atau Schiopherenia Sosial” dalam *Kompas*.
- Wahjoetomo. (1997). *Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bowles, Samuel dan Gintis, Herbert. (2003). “Pendidikan Revolusioner” dalam *Menggugat Pendidikan, Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis*, (Omi Intan Naomi, Alih Bahasa), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. IV.
- Wahono, Francis. (2001). *Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetensi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II.
- Abdullah, Taufiq . (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Morris, Ivor. (1976). *Aspects of Educational Change*, London.
- Sirin, Sjafri. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Syah, Muhibbin. (1999). *Psikologi Belajar*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Usman, Sunyoto. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II.